

## STUDI ANALISIS KONSISTENSI DAN KECUKUPAN BAHAN AJAR MATERI DEMOKRASI PADA DIKTAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN KELAS X TUNARUNGU DI SLB NEGERI SURAKARTA TAHUN AJARAN 2016/2017<sup>1</sup>

Oleh :

Hanik Camelia Ayu Putri Pertiwi Robin, Hassan Suryono & Wijianto<sup>2</sup>

Alamat E-mail: hanikcamelia@gmail.com

### ABSTRACT

*This research aimed to: (1) improve the accuracy of consistency principle of materials for the topic of Democracy within the Dictate of Civic Education for class X of hearing impaired students, (2) improve the accuracy of sufficiency principle of materials for the topic of Democracy within the Dictate of Civic Education in class X of hearing impaired students.*

*This research used embedded single qualitative method. Data were collected by means of interview, document analysis, and observation. Triangulation of data and theories were conducted to ensure the data validity. The data were then analyzed using content analysis method.*

*Based on the research findings, it was concluded that: (1) Dra.Wahyu Trimei Pujilestari's Dictate of Civic Education for class X of hearing impaired students had not fully met the consistency principle and the determined indicators in the syllabus. This was evident from the fact that there were still some indicators of consistency principle that were not covered yet, such as: a. balance of the materials, b. range of the materials, and c. presentation of the materials; (2) Materials for the topic of Democracy within the Dictate of Civic Education in class X of hearing impaired students had not met the sufficiency principle, of which materials to be taught should be adequate to help students master basic competences. This was proved by the fact that there were several indicators of sufficiency principle that had not been covered such as: a. coverage of the materials, b. connection with Pancasila, c. accuracy of the facts. Materials in the syllabus were not fully listed in the Dictate of Civic Education in class X of hearing impaired students. Some addition and omission were necessary.*

**Keywords :** Consistency, Sufficiency, Teaching Materials, Dictate

---

<sup>1</sup>Artikel Penelitian

<sup>2</sup>Program Studi PPKn FKIP UNS Surakarta

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya keilmuan juga harus diikuti oleh perkembangan materi yang ada di sekolah-sekolah. Menurut Adjat Sudrajat (2009: <http://natalegawa.com>) menyatakan bahwa, "Perkembangan materi atau bahan ajar harus memperhatikan tuntutan kurikulum". Artinya bahan belajar yang akan kita kembangkan harus sesuai dengan kurikulum. Pada kurikulum tingkat satuan pendidikan, standar kompetensi lulusan telah ditetapkan oleh pemerintah, namun bagaimana untuk mencapainya dan apa bahan ajar yang digunakan diserahkan sepenuhnya kepada para pendidik sebagai tenaga profesional. Dalam hal ini, guru dituntut untuk mempunyai kemampuan mengembangkan bahan ajar sendiri. Untuk mendukung kurikulum, sebuah bahan ajar bisa saja menempati posisi sebagai bahan ajar pokok ataupun suplementer. Bahan ajar pokok adalah bahan ajar yang memenuhi tuntutan kurikulum. Sedangkan bahan ajar suplementer adalah bahan ajar yang dimaksudkan untuk memperkaya, menambah ataupun memperdalam isi kurikulum.

Materi pembelajaran yang dipilih untuk diajarkan oleh guru dan harus dipelajari siswa hendaknya berisikan materi atau bahan ajar yang benar-benar menunjang tercapainya

standar kompetensi dan kompetensi dasar.

Menurut Aunurrahman (2009: 79) prinsip pemilihan bahan ajar, yaitu: "Prinsip relevansi, prinsip konsistensi, dan prinsip kecukupan". Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Prinsip relevansi artinya keterkaitan. Materi pembelajarn hendaknya relevan atau ada kaitan atau ada hubungannya dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebagai misal, jika kompetensi yang diharapkan dikuasai siswa berupa menghafal fakta, maka materi pembelajaran yang diajarkan harus berupa fakta atau bahan hafalan.
- 2) Prinsip konsistensi artinya keajegan. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa empat macam, maka bahan ajar yang harus diajarkan juga harus meliputi empat macam. Misalnya kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa adalah mendeskripsikan pengertian, menganalisis peranan, menunjukkan sikap, menganalisis upaya, maka materi yang harus diajarkan sesuai dengan kompetensi dasar tersebut.
- 3) Prinsip kecukupan artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh

terlalu sedikit, dan tidak boleh terlalu banyak. Jika terlalu sedikit akan kurang membantu mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebaliknya, jika terlalu banyak akan membuang-buang waktu dan tenaga yang tidak perlu untuk mempelajarinya.

Uraian diatas dapat peneliti simpulkan selain memperhatikan jenis materi pembelajaran juga harus memperhatikan prinsip relevansi, prinsip konsistensi, dan prinsip kecukupan yang perlu digunakan dalam menentukan cakupan materi pembelajaran yang menyangkut keluasan dan kedalaman materinya. Keluasan cakupan materi berarti menggambarkan berapa banyak materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran, sedangkan kedalaman materi seberapa detail konsep-konsep yang terkandung di dalamnya harus dipelajari/dikuasai oleh siswa.

Masalah yang sering dihadapi guru berkenaan dengan bahan ajar pada materi demokrasi adalah guru memberikan bahan ajar atau materi pembelajaran tersebut terkadang terlalu luas atau terlalu sedikit, terlalu mendalam atau terlalu dangkal, urutan penyajian yang tidak tepat, dan jenis materi bahan ajar yang tidak sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai oleh siswa, Hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti ketika menanyakan hal

tersebut kepada guru pendidikan kewarganegaraan beliau menyatakan belum sepenuhnya menerapkan prinsip konsistensi dan prinsip kecukupan dalam menyusun materi pembelajaran hal ini dapat di lihat pada Standar Kompetensi 2. Memahami kehidupan berdemokrasi dan Kompetensi Dasar 2.1 Menjelaskan pengertian demokrasi, 2.2 Menjelaskan pentingnya kehidupan berdemokrasi dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara dan 2.3 Menampakkan perilaku sikap positif terhadap kehidupan berdemokrasi dalam berbagai kehidupan. Materi Demokrasi, Pentingnya Kehidupan Demokrasi dalam Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara, penerapan demokrasi bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi dalam berbagai kehidupan dalam hal ini belum memenuhi prinsip konsistensi, di karenakan materi yang diajarkan tidak sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa selain itu materi yang diajarkan juga terlalu banyak sehingga akan membuang-buang waktu untuk mempelajarinya, dalam hal ini belum adanya prinsip kecukupan dikarenakan materi yang diajarkan belum sepenuhnya membantu siswa untuk menguasai kompetensi dasar yang akan diajarkan.

## 2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian tersebut adalah 1) Untuk mengetahui ketepatan prinsip konsistensi pada materi Demokrasi di dalam Diktat Pendidikan Kewarganegaraan kelas X Tunarungu; 2) Untuk mengetahui ketepatan prinsip kecukupan pada materi Demokrasi di dalam Diktat Pendidikan Kewarganegaraan kelas X Tunarungu.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di SLB Negeri Surakarta. penelitian ini menggunakan metode penelitian tunggal terpancang. Artinya bahwa penelitian ini terarah pada satu karakteristik dan satu sasaran atau lokasi yaitu hanya di Sekolah Luar Biasa Negeri Surakarta dan terpancang pada prinsip konsistensi dan kecukupan bahan ajar pada Diktat Pendidikan Kewarganegaraan kelas X tunarungu di SLB Negeri Surakarta

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif sebab dalam penelitian ini mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai prinsip konsistensi dan kecukupan pada materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas X Tunarungu. sumber data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah data yang berupa informan, serta dokumen atau arsip. teknik

pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, studi dokumen dan observasi. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap guru Pendidikan Kewarganegaraan dan ahli materi. Dokumen yang dianalisis dalam penelitian ini diantaranya Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Diktat Pendidikan Kewarganegaraan, penelitian ini menggunakan observasi yakni peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian yakni SLB Negeri Surakarta.

H.B Sutopo (2002 : 78) berpendapat “Validitas data adalah pengujian data yang didapat dalam penelitian untuk mengetahui apakah data tersebut kebenarannya dipertanggungjawabkan atau tidak”.

Pengujian data dilakukan dengan triangulasi data untuk menjamin kemantapan dari data penelitian ini. Menurut Lexy J Moleong (2008 : 330) bahwa “Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”.

Menurut Patton yang dikutip oleh H.B Sutopo (2002: 78) triangulasi data ada empat macam :

1. Triangulasi Data, artinya data yang sama atau sejenis akan lebih mantap kebenarannya bila digali

dari beberapa sumber yang berbeda.

2. Trianggulasi Metode, jenis triangulasi ini bisa dilakukan oleh seorang peneliti dengan mengumpulkan data sejenis tetapi dengan menggunakan teknik dan metode yang berbeda.
3. Trianggulasi Peneliti, yaitu hasil penelitian baik data atau simpulan mengenai bagian tertentu atau keseluruhannya bisa diuji validitasnya dari beberapa peneliti.
4. Trianggulasi Teori, triangulasi ini dilakukan peneliti dengan menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan yang dikaji.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi data dan triangulasi teori. Sebab cara ini mengarahkan peneliti agar dalam pengumpulan data harus menggunakan beragam data yang tersedia, artinya data yang sama atau sejenis akan lebih akurat kebenarannya bila digali dari beberapa sumber yang berbeda. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan cara mencari data dari informan. Selain itu Teknik triangulasi teori dilakukan dalam menguji keabsahan data menggunakan perspektif lebih dari satu dalam membahas permasalahan-permasalahan yang dikaji, sehingga dapat dianalisis dan

ditarik kesimpulan yang lebih utuh dan menyeluruh.

Menurut Lexy J. Moleong (2008: 280) "Analisis data adalah proses mengorganisasikan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan oleh data". Dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (*content analysis*). Menurut Budd dalam Bungin (2001: 134), "Metode analisis isi pada dasarnya merupakan suatu teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan, atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis isi perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih".

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Prinsip Konsistensi bahan ajar materi demokrasi pada diktat kelas X tunarungu di SLB Negeri Surakarta.

Dari hasil wawancara, analisis dokumen dan observasi Pada Diktat Bahan Ajar SLB Kelas X Tunarungu seluruh butir memuat prinsip konsistensi memiliki nilai rata-rata 2,20 yang berarti kategori kurang sesuai. Dari tabel dapat dilihat skor tertinggi adalah 2,5 dan skor terendah adalah 1,75. Skor tertinggi terdapat pada butir ke-2 meskipun dikatakan skor tertinggi 2,5 akan tetapi belum dapat dikatakan

memenuhi prinsip konsistensikarena skor 2,5 masuk dalam kategori kurang sesuai, yang berisi tentang materi yang disajikan mencerminkan jabaran substansi materi yang terkandung dalam Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) pada tiap-tiap satuan pendidikan. Hal ini materi yang dijabarkan sudah mencakup standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan pada tiap-tiap satuan pendidikan.

Sedangkan skor terendah terdapat pada butir ke- 3 yakni Penyajian materi bersifat interaktif dan partisipatif yang memotivasi peserta didik terlibat secara mental dan emosional untuk belajar secara mandiri dan kelompok dalam pencapaian SK dan KD ataupun dalam penyajiannya masih bersifat interaktif sehingga belum mampu memotivasi siswanya untuk ikut andil dalam mempelajari materi demokrasi sesuai Standar Kompetensi (SK) maupun Kompetensi Dasarnya (KD), misalnya dalam memberikan contoh sikap/perilaku demokrasi dalam kehidupan sehari-hari atau diberbagai bidang sebaiknya contohnya yang lebih bersifat sederhana yang ada dilingkungan sekitar sehingga akan lebih dipahami oleh siswa-siswi tunarungu. dan butir ke-2 yang berisi tentang Uraian antar subbab proporsional dengan mempertimbangkan SK dan KD.

Menurut Hackbarth (1996: 80) yang dikutip oleh Purwanto dan Ida Melati Sadjati dalam buku *Teknologi Pembelajaran* (2004: 417) Bahan ajar adalah sarana belajar yang berfungsi membantu membelajarkan peserta didik secara sistematis, terarah sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Bahan ajar yang modern terdiri atas buku peserta didik, dan dilengkapi dengan petunjuk tenaga pengajar, lembar kerja peserta didik, dan soal test.

Bahan ajar yang baik adalah buku yang dihasilkan oleh penulis dan penerbit yang bekerja dengan baik dalam arti mereka melakukan penelitian tentang buku tersebut dengan baik, diujicobakan dengan baik, diedit dengan baik, dibuatkan ilustrasi dengan baik, dan didesain dengan baik pula (*well-researched, well-tested, well-edited, well-illustrated, and well-designed*), dengan melibatkan tenaga-tenaga yang kompeten dalam suatu tim. Untuk dapat melakukan hal-hal tersebut mereka harus terdidik dengan baik dan terlatih.

Bahan ajar yang dinilai baik harus memenuhi berbagai kriteria, antara lain isinya sesuai dengan kurikulum, penyajiannya sistematis dan dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Salah satu upaya yang dapat ditempuh oleh tenaga pengajar dalam menghasilkan bahan ajar yang baik adalah dengan

menyusun kerangka atau struktur isi buku sebelum menulisnya secara lengkap. Penyusunan kerangka atau struktur isi buku dimulai dengan suatu kegiatan analisis terhadap kompetensi yang ada pada kurikulum.

Mengukur prinsip bahan ajar, baik konsistensi maupun prinsip kecukupan terdapat indikator-indikator yang berpatokan pada Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang menjadi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Ukuran (indikator) prinsip bahan ajar konsistensi adalah:

- a) Keseimbangan materi, uraian antar sub bab proporsional dengan mempertimbangkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar
- b) Keluasan Materi, materi yang disajikan mencerminkan jабaran substansi materi yang terkandung dalam Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar tiap-tiap satuan pendidikan.
- c) Penyajian Materi, bersifat interaktif dan partisipatif yang memotivasi peserta didik terlibat secara mental dan emosional untuk belajar secara mandiri dan kelompok dalam pencapaian Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar.

Jika dikaitkan dengan teori di atas maka indikator prinsip bahan ajar konsistensi yang ada pada diktat

seluruh butir memuat prinsip konsistensi memiliki nilai rata-rata 2,20 yang berarti kategori kurang sesuai di lihat dari: (a) Keseimbangan materi belum sesuai, hal ini ditunjukkan Kompetensi Dasar Menampakkan perilaku sikap positif terhadap kehidupan berdemokrasi dalam berbagai kehidupan sedangkan materinya Penerapan Demokrasi dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (b) Keluasan Materi belum sesuai, hal ini ditunjukkan dengan masih adanya materi seperti pentingnya kehidupan demokrasi dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara belum ada contoh riilnya. (c) Penyajian materi, untuk penyajian materi juga belum bersifat interaktif, sehingga belum mampu memotivasi siswanya untuk ikut andil dalam mempelajari materi ini sesuai Standar Kompetensi ataupun Kompetensi Dasarnya.

#### **B. Prinsip Kecukupan bahan ajar materi demokrasi pada diktat kelas X tunarungu di SLB Negeri Surakarta**

Pada Diktat Bahan Ajar SLB Kelas X Tunarungu seluruh butir memuat prinsip kecukupan memiliki nilai rata-rata 2,48 yang berarti kategori kurang sesuai. Dari tabel dapat dilihat skor tertinggi adalah 2,75 dan skor terendah adalah 2,25. Skor tertinggi terdapat pada butir ke-butir ke-5 dan 7 yang berisi tentang konsep yang disajikan tidak menimbulkan salah pengertian dan

sesuai dengan sajian kewarganegaraan dan Prinsip/hukum yang disajikan memiliki legitimasi keilmuan sesuai dengan kajian kewarganegaraan, namun pada kenyataannya teori atau sumber digunakan belum merujuk pada sumber-sumber primer atau sumber pokok dari materi tersebut, kemudian prinsip/hukum yang disajikan memiliki legitimasi keilmuan belum sesuai dengan kajian kewarganegaraan hal ini dapat dilihat pada daftar pustaka yang ada dalam Diktat Bahan Ajar SLB Kelas X Tunarungu buku-buku rujukan/materi yang diambil berasal dari buku-buku yang digunakan oleh MGMP PKn SMP dan Internet sehingga kerelevansiannya diragukan.

Sedangkan skor terendah terdapat pada butir ke-2,3 dan 4 yang berisi tentang materi dimulai dari pengenalan fakta, konsep/teori, prinsip/hukum, prosedur, nilai/norma sampai hubungan antar konsep yang mencakup sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar tiap-tiap satuan pendidikan, pembahasan materi dikaitkan dengan nilai-nilai pancasila dan fakta yang disajikan sesuai dengan kenyataan empiris dan sesuai dengan materi sajian, dikarenakan penjelasan belum komprehensif dalam perspektif kewarganegaraan yaitu tiga komponen utama yang perlu dipelajari dalam PKn, yaitu *civic*

*knowledge*, *civic skills*, dan *civic dispositions* disamping itu penyajian materi dalam Diktat Bahan Ajar SLB Kelas X Tunarungu prosedur yang disajikan belum runtut.

Mengukur prinsip bahan ajar, baik konsistensi maupun prinsip kecukupan terdapat indikator-indikator yang berpatokan pada Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang menjadi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Ukuran (indikator) prinsip bahan ajar kecukupan adalah:

- a) Cakupan Materi, memuat pengetahuan sikap dan keterampilan Kewarganegaraan secara komprehensif.
- b) Kedalaman Materi, Materi dimulai dari pengenalan fakta, konsep/teori, prinsip/hukum, prosedur, nilai/norma sampai hubungan antar konsep yang mencakup sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar tiap-tiap satuan pendidikan
- c) Keterkaitan dengan Pancasila, Pembahasan materi dikaitkan dengan nilai-nilai pancasila.
- d) Ketepatan Fakta, Fakta yang disajikan sesuai dengan kenyataan empiris dan sesuai dengan materi sajian
- e) Ketepatan Konsep, konsep yang disajikan tidak menimbulkan salah pengertian dan sesuai dengan kajian kewarganegaraan.



- f) Ketepatan Teori, teori yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sesuai dengan kajian kewarganegaraan.
- g) Ketepatan Prinsip, Prinsip/hukum yang disajikan memiliki legitimasi keilmuan sesuai dengan kajian kewarganegaraan.
- h) Ketepatan Prosedur, Prosedur yang disajikan runtut (memiliki tahapan yang logis dan sistematis) dan sesuai dengan kajian kewarganegaraan.
- i) Kebenaran Nilai, Nilai yang disajikan sesuai dengan filosofi bangsa (pancasila) dan sesuai dengan pokok bahasan tiap bab atau sub bab.

Jika dikaitkan dengan teori di atas maka indikator prinsip bahan ajar kecukupan yang ada pada diktat seluruh butir memuat prinsip kecukupan memiliki nilai rata-rata 2,48 yang berarti kategori kurang sesuai dilihat dari: (a) Cakupan Materi, Memuat pengetahuan sikap dan keterampilan kewarganegaraan secara komprehensif belum sesuai, hal ini dibuktikan belum ada pengetahuan kewarganegaraan. (b) Kedalaman Materi, sudah memenuhi meskipun materi dimulai dari konsep bukan fakta. (c) Keterkaitan dengan Pancasila, pembahasan materi belum ada kaitannya dengan nilai-nilai pancasila. (d) Ketepatan Fakta, belum ada fakta hal ini ditunjukkan pada pembahasan materi masih berupa konsep. (e) Ketepatan Fakta,

tidak ditemukan konsep yang menimbulkan salah pengertian. (f) Ketepatan Teori, teori yang ada didalam diktat dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya hal ini ditunjukkan oleh teori dari Abraham Lincoln yang menyatakan bahwa Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat, dan untuk rakyat. (g) Ketepatan Prinsip, sudah sesuai hal ini ditunjukkan dengan prinsip pokok pemerintahan demokrasi a. Adanya pengakuan dan partisipasi rakyat dalam pemerintahan b. Adanya pengakuan dan jaminan hak asasi manusia. (h) Ketepatan Prosedur, sudah sesuai hal ini dapat dilihat dalam penyajian materi yang bersumber dari Kompetensi Dasar yang ada pada bab Demokrasi. (i) Kebenaran Nilai, nilai yang disajikan sudah sesuai dengan filosofi bangsa indonesia.

Penelitian mengenai prinsip konsistensi dan prinsip kecukupan di dalam Diktat bahan ajar pendidikan kewarganegaraan SLB kelas X tunarungu pada materi demokrasi menunjukkan bahwa belum sepenuhnya mencakup kedua prinsip tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa materi demokrasi tersebut tidak mendukung teori elaborasi tentang pengorganisasian materi pembelajaran dan prinsip konsistensi dan prinsip kecukupan, karena dalam menyajikan materi yang ada di dalam diktat tersebut belum

diorganisasikan sesuai dengan teori elaborasi.

Menurut Degeng (1988: 296) menyatakan bahwa :Teori elaborasi mendeskripsikan cara pengorganisasian pengajaran dengan mengikuti urutan umum-ke-rinci. Urutan umum-ke-rinci dimulai dengan menampilkan epitome (struktur isi bidang studi yang dipelajari), kemudian mengelaborasi bagian-bagian yang ada dalam epitome secara lebih rinci.

Dimana dalam teori elaborasi menekankan bahwa dalam mengorganisasikan materi pembelajarandimulai dari umum ke rinci berdasarkan teori keilmuan, sedangkan diktat tersebut mengorganisasikan materi pembelajaran dari khusus ke umum berdasarkan silabus.

#### **D. SIMPULAN & SARAN**

##### **1. Simpulan**

Berdasarkan deskripsi permasalahan yang telah diuraikan di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Materi Demokrasi pada Diktat bahan ajar pendidikan kewarganegaraan kelas X Tuna rungu karangan Dra.Wahyu Trimei Puji lestari belum memenuhi indikator prinsip konsistensi dan indikator yang telah ditentukan pada silabus. memenuhi prinsip konsistensi yaitu keajegan/taat asas, dimana materi yang harus diajarkan siswa harus

sesuai dengan kompetensi dasar yang telah ditentukan pada silabus. Hal ini dibuktikan dengan masih terdapat indikator prinsip konsistensi yang belum terpenuhi diantaranya: a. Keseimbangan materi b. Keluasan Materi c. Penyajian Materi, materi pembelajaran pada diktat lebih banyak dibandingkan dengan materi pembelajaran yang ada pada silabus ini menunjukkan bahwa diktat tersebut belum sepenuhnya mencakup prinsip konsistensi.

Kedua, Materi Demokrasi pada Diktat bahan ajar pendidikan kewarganegaraan SLB kelas X tunarungu belum sepenuhnya memenuhi prinsip kecukupan yaitu prinsip dimana materi yang harus diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Hal ini dibuktikan dengan masih terdapat indikator prinsip kecukupan yang belum terpenuhi diantaranya: a. Cakupan materi c. Keterkaitan dengan pancasila d. Ketepatan fakta. sedangkan yang sudah memenuhi indikator prinsip kecukupan diantaranya: b. Kedalaman materi e. Ketepatan konsep f. Ketepatan teori g. Ketepatan Prinsip h. Ketepatan prosedur i. Kebenaran nilai, materi yang terdapat pada silabus belum sepenuhnya terdapat pada diktat Pendidikan Kewarganegaraan kelas X Tunarungu di SLB Negeri Surakarta, perlu adanya pengurangan ataupun penambahan materi pada Diktat

Pendidikan Kelas X Tunarungu di SLB Negeri Surakarta.

## 2. Saran

### a) Bagi Pemerintah

Dalam membuat kebijakan prinsip-prinsip yang dijadikan dasar dalam menentukan materi pembelajaran pemerintah harus lebih memperhatikan kompetensi guru, tidak semua guru ahli dalam membuat atau menulis diktat berdasarkan prinsip-prinsip yang dijadikan dasar dalam menentukan materi pembelajaran, pemerintah juga hendaknya lebih sering mengadakan work shop mengenai cara membuat atau menulis diktat yang baik dan benar yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam menentukan materi pembelajaran.

### b) Bagi Penulis Diktat

Diktat pelajaran sebagai sumber informasi seyogjanya memiliki kualitas yang baik, yang memenuhi kriteria standar tertentu yaitu prinsip relevansi, prinsip konsistensi dan prinsip kecukupan. Namun demikian berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa materi demokrasi pada diktat bahan ajar pendidikan kewarganegaraan SLB kelas X tunarungu belum sepenuhnya memenuhi prinsip konsistensi dan prinsip kecukupan. Untuk mendapatkan kualitas yang baik penulis diktat harus memperhatikan prinsip pemilihan bahan ajar yang ada khususnya prinsip konsistensi dan prinsip

kecukupan. Disarankan pada diktat bahan ajar pendidikan kewarganegaraan SLB kelas X tunarungu dalam penyajian materi kewarganegaraan pada materi demokrasi dapat dikemas sedemikian rupa sehingga tidak hanya bersifat abstrak, tetapi selalu ada kesesuaian antara teori dan fakta.

### c) Bagi Guru

Untuk menghasilkan materi kewarganegaraan khususnya pada materi demokrasi agar memenuhi prinsip konsistensi dan prinsip kecukupan dan berdasarkan hasil penelitian bahwa materi demokrasi pada diktat pendidikan kewarganegaraan SLB kelas X tunarungu belum sepenuhnya memenuhi prinsip konsistensi dan prinsip kecukupan maka guru harus melakukan kajian terhadap materi yang akan diberikan sehingga materi yang diberikan kepada siswa merupakan kualitas yang maksimal.

### d) Bagi Peneliti Lain

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa materi demokrasi pada diktat bahan ajar pendidikan kewarganegaraan SLB kelas X tunarungu belum sepenuhnya memenuhi prinsip konsistensi dan prinsip kecukupan. Perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk kompetensi-kompetensi yang lain, sehingga bisa dievaluasi pengembangan silabus dari kurikulum yang ada maupun diktat

mata pelajaran yang beredar dipasaran.

### DAFTAR PUSTAKA

- Aunurrahman. (2009). Belajar dan Pembelajaran. Bandung. Alfabeta.
- Budimansyah, Dasim dan Suryadi, K. (2007). *PKn dan Masyarakat Multikural*. Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik: Edisi Revisi*: PT Gramedia Pustaka Utama
- Cholisin. (2013). Ilmu Kewarganegaraan (Civics). Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Dahl, R. A (1992). Terjemah A Rahman Zainuddin, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- David Kerr. (1999). *Citizhenship Education and Internasional Comparison*. <http://www/imca.org.uk/pdf/citizhenship-no-intro-pdf>. Diunduh: tanggal 20 Januari 2017, pukul 11:19
- Fatah, E. S. (1994). *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Gaffar, A. (1999). *Politik Indonesia: Trasisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Gafur Abdul. (1986). Desain Intruksional: Langkah Sistematis Penyusunan Pola Dasar Kegiatan Belajar Mengajar, Solo: Tiga Serangkai
- Hamalik, Oemar. (2006). *Menejemen Pengembangan Kurikulum*. Bandung : P.T. Remaja Rosdakarya.
- HB. Sutopo. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press
- Huntington, S. P. (1995). *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Idi Abdullah. (2007). *Pengembangan Kurikulum Teori & Praktek*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media..
- I Nyoman Sudana Degeng. (1989). *Kerangka Perkuliahan dan Bahan Pengajaran*. Jakarta: Direktur Jenderal Pergurua Tinggi Proyek Pengembangan LPTK.

- Kevin Carmody And Zane Berge (2005). *"Elemenal Analysis Of The Online Learning Experience". International Journal of Education and Development Using ICT*. Vol. 1 No 3.
- Kunandar. (2011). *Guru Profesional (Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Lexy J Moleong. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Majid Abdul. (2008). *Perencanaan Pembelajaran*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Majid, Abdul. (2009). *Perencanaan Pembelajaran: Mengembangkan Standar Kompetensi Guru*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- M. Joko Susilo. (2007). *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mudyaharjo Redja. (2001). *Filsafat Ilmu Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mulyasa. E. (2007). *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2009). *Menjadi Guru yang Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Bandung: Remasa Rosda Karya
- Musfah, Jijen (2011). *Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar Teori dan Praktek*. Jakarta: Kencana
- Moh. Mahfud MD. (1993). *Demokrasi dan Konsitusi di Indonesia: Studi tentangl Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Yogyakarta: Liberty
- Nurtjahjo, H. (2006). *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- \_\_\_\_\_ (2009). *Panduan Pembuatan Bahan Ajar oleh Badan Pengembangan Akademik*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia
- Purwanto dan Ida Melati Sadjati. (2004). *Teknologi Pembelajaran*. Jakarta: Pusat Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan.
- Rusdiana, & Heryati. (2015). *Pendidikan Profesi Keguruan (Menjadi Guru Inspiratif dan Inovatif)*. Bandung: Pustaka Setia
- Rosh, B. (1973). *Civics*. USA: Follet Publishing Company

- Sagala, Syaiful (2009). *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*. Bandung: Alfabeta
- Shantie, C., & Hoffmeister, R. J. (2000). *Why schools for deaf children should hire deaf teachers: A preschool issue*. *Journal of Education*, 182(3), 37–47.
- Sudrajat Adjat (2009: <http://natalegawa.com>). Diunduh tanggal 22 Desember 2016, pukul 10.20 WIB
- Sugiyono.(2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung.
- Susilo Tri W. (2007). *Studi Analisis Materi Kewarganegaraan di SMA Negeri 8 Surakarta Dengan Materi Kuliah di Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Sebelas Maret*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret.
- Tim ICCE UIN Jakarta. (2003). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah dengan Asia Foundation dan Prenada Media
- Wahyudi. (2008). *Studi Analisis Relevansi Materi Kewarganegaraan di SMP Negeri 16 Surakarta Dengan Materi Kuliah di Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Sebelas Maret*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret.
- Wahyu Tri M. (2016). *Diktat Bahan Ajar SLB Pendidikan Kewarganegaraan Kelas X Tunarunguwicara*.
- Zamroni. (2001). *Pendidikan Untuk Demokrasi: Tantangan Menuju Civil Society*. Yogyakarta: BIGRAF Publishing
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun (2003) Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun (2005) Tentang Guru dan Dosen
- Permendiknas Nomor 22 Tahun (2006) Tentang Standar Isi
- Permendiknas Nomor 23 Tahun (2006) Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan SMALB